**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya (Todaro,2006:16).

Pembangunan ekonomi ini dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian salah satunya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja, yang berdapak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan demikian kesempatan kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang lebih layak. Pengangguran ini timbul karena jumlah penduduk akan memberi makna bahwa jumlah orang yang mecari pekerjaan akan meningkat sedangkan lapangan pekerjaan yang tesedia lebih kecil.

Dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi masalah pengangguaran, masalah laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB, upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah perlu diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB di Kota Bandung menunjukkan kenaikan yang positif, kondisi tersebut membuktikan bahwa Kota Bandung mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan kegiatan ekonomi Kota Bandung didukung oleh sektor-sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang paling tinggi kontribusinya pada perekonomian Kota Bandung. Pembangunan sektor industri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik yang pindah dari sektor pertanian maupun yang baru memasuki pasar kerja

**Tabel 1.1**

**PDRB Tiap Sektor Kota Bandung Menurut Harga Konstan 2000**

**Periode 2012-2014 ( Juta Rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sektor** | **PDRB** | | |
| **2012** | **2013** | **2014** |
| Pertanian | 173.418 | 180.669 | 180.982 |
| Industri pengolahan | 28. 225. 278 | 29. 371. 304 | 30. 755. 949 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 131.660 | 138.005 | 142.707 |
| Bangunan Kontruksi | 10.576.563 | 11.480.053 | 12.260.691 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 34.543.406 | 37.550.557 | 40.412.177 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 10.711.883 | 12.155.533 | 13.947.533 |
| Keuangan,Persewaan,dan JasaPerusahaan | 6.332.910 | 6.801.284 | 7.320.271 |
| Jasa-jasa | 3.630.685 | 4.048.003 | 4.518.257 |
| **PDRB** | **94,325,803** | **101,725,408** | **109,538,490** |

Sumber : BPS Kota Bandung, 2012

Pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa PDRB sektor pengolahan menempati urutan kedua sebesar 30.755.949 setalah sektor perdagangan,hotel dan restoran sebesar 34.543.406. Industri pengolahan ini merupakan salah satu sektor industri yang cukup potensial dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bandung. Dilihat dari tabel diatas, industri pengolahan Kota Bandung mengalami pertumbuhan yang positif dan relatif tinggi apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini terlihat bahwa industri pengolahan Kota Bandung mampu memberikan konstribusi yang lebih tinggi lagi tehadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan, kontribusi ini diindikasikan semakin menggeliatnya perkembangan industri kreatif di Kota Bandung. Berkembangnya indutri kreatif mampu menjadi faktor memperkuat indistri pengolahan sebagai potensi unggulan daerah di Kota Bandung.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri dalam pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukan nilai yang signifikan peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional dalam ditelusuri dari PDRB masing-masing sub sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional atau terhadap produk domestik bruto. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri mamiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. (Bappeda Kota Bandung).

Peran sektor industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari adanya upah minimum dan belanja daerah. Pemberian upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan perundang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat pekerja pengusaha dan perbedaan jenis pekerjaan.

Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri, berdasarkan teorinya, upah yang tinggi akan membuat biaya produksi industri juga meningkat, akibatnya, harga suatu produksi juga meningkat. Peningkatan harga produksi ini memaksa produsen untuk mengurangi permintaan tenaga kerja (Sumarsono,2013).

**Tabel 1.2**

**Upah Minimum Regional Jawa Barat Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kota** | **Tahun** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Kota Bekasi | 2.100.000 | 2.441.954 | 2.954.031 |
| 2. | Kota Depok | 2.042.000 | 2.397.000 | 2.705.000 |
| 3. | Kota Bogor | 2.002.000 | 2.352.350 | 2.658.155 |
| 4. | Kota Bandung | 1.48.900 | 2000.000 | 2.310.000 |
| 5 | Kota Cimahi | 1.338.333 | 1.735.473 | 2.001.200 |
| 6 | Kota Cirebon | 1.082.500 | 1.226.500 | 1.415.000 |
| 7 | Kota Sukabumi | 1.050.000 | 1.350.000 | 1.572.000 |
| 8 | Kota Tasikmalaya | 1.045.000 | 1.237.000 | 1.450.000 |
| 9 | Kota Banjar | 950.000 | 1.025.000 | 1.168.000 |

Sumber : BPS Jawa Barat

Jika dilihat dari upah minimum regional di Kota Bandung yang ditunjukkan dalam tabel 1.2 dapat terlihat upah minimum Kota Bandung berada pada posisi ke empat terbesar setelah Kota Bekasi, Depok dan Bogor. Dari tahun 2013 sampai 2015 upah minimum Kota Bandung mengalami kenaikan yang terus menerus dengan besar upah minimum regional pada tahun 2013 sebesar 1.538.70, tahun 2014 sebesar 2000.000 dan tahun 2015 sebesar 2.310.000. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mempunyai alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

Disamping upah minimum peneliti juga dapat melihat penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung yang dilihat dari perkembangan anggaran belanja daerah. Belanja daerah atau yang lebih dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah)

**Tabel 1.3**

**Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2013-2015 ( Milyar Rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kota** | **Tahun** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Kota Bekasi | 1.256.848.766.580 | 1.511.751.545.621 | 1.662.999.790.601 |
| 2. | Kota Depok | 1.662.999.790.601 | 2.097.914.920.123 | 2.534.771.028.583 |
| 3. | Kota Bogor | 349.545.992 | 826.655.925.565 | 885.823.303.341 |
| 4. | Kota Bandung | 3.387.933.569.000 | 4.705.674.779.140 | 5.103.565.462.000 |
| 5 | Kota Cimahi | 573.172.157.116 | 604.608.809.392 | 605.632.082.035 |
| 6 | Kota Cirebon | 431.902.133.026 | 468.781.133.491 | 488.036.583.660 |
| 7 | Kota Sukabumi | 422.987.123.967 | 433.547.228.000 | 450.770.765.553 |
| 8 | Kota Tasikmalaya | 857.087.539.086 | 887.975.335.001 | 902.776.987.431 |
| 9 | Kota Banjar | 299.949.520.652 | 282.599.803.135 | 246.301.723.237 |

Daerah Kota Bandung dari tahun 2013-2015 terus menerus mengalami kenaikan yang terus menerus, dengan belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 3.387.933.569.000, tahun 2014 sebesar 4.705.674.779.140 dan tahun 2015 sebesar 5.103.565.462.000. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kota Bandung membutuhkan banyak biaya yang besar diantaranya yaitu pembangunan infrastruktur yang berguna untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang berdampak pada kegiatan perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkat kegiatan perekonomian daerah. Sementara upah, walaupun tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Besar kecilnya jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Angka pengangguran di Kota Bandung saat ini sedang terjadi masalah yang begitu sulit, hal ini dilihat berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang melihat angka pengagguran Kota Bandung meningkat sekitar 12 ribuan semenjak tahun 2014. Pada tahun 2014 warga Kota Bandung yang tidak memiliki pekerjaan berjumlah 95 ribu orang. Pengangguran di Kota Bandung ini terus menerus meningkat sampai akhir tahun 2015 dengan tingkat pengangguran sebanyak 107.565 orang. Faktor utama dari terus bertambahya penggangguran ini adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 berada pada masa yang sangat sulit, penyebabnya adalah iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan. Berada dalam kondisi seperti ini menjadi suatu kendala bagi perusahaan dalam menerima pegawai, karena biaya produksi yang meningkat sementara keuntungan yang didapat tidak mencapai target. Hal ini membuat tidak sedikit perusahaan memberhetikan pegawainya dikarenakan untuk menekan biaya produksi di tengah kondisi bisnis yang sulit. Tidak hanya itu saja, faktor mikro dan makro ekonomi dalam dunia bisnis mempengaruhui pertumbuhan ekonomi dan daya beli,alhasil pendapatan perusahaan tidak meningkat. Lowongan kerja yang sedikit ini berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang siap bekerja. Banyaknya warga yang cukup usia untuk bekerja tidak didukung dengan lowongan kerja yang memadai (Disnaker,2015)

**Tabel 1.4**

**Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat Tahun 2013-2015 (orang)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kota** | **Tahun** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Kota Bekasi | 990.630 | 1.063.637 | 1.097.433 |
| 2. | Kota Depok | 728.675 | 836.688 | 912.403 |
| 3. | Kota Bogor | 391.221 | 403.628 | 415.776 |
| 4. | Kota Bandung | 1.311.051 | 1.403.354 | 1.554.643 |
| 5 | Kota Cimahi | 225.801 | 231.379 | 255.967 |
| 6 | Kota Cirebon | 120.967 | 129.208 | 132.567 |
| 7 | Kota Sukabumi | 119.803 | 118.252 | 117.978 |
| 8 | Kota Tasikmalaya | 253.713 | 289.166 | 302.053 |
| 9 | Kota Banjar | 71.340 | 73.441 | 76.760 |

Sumber: BPS Kota Bandung 2014

Dari tabel 1.4 diatas terlihat bahwa Kota Bandung salah satu kota yang dapat menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini terlihat penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung dari tahun 2013-2015 terus menerus mengalami peningkatan, dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 1.311.051 orang, tahun 2014 sebanyak 1.403.352 dan pada tahun 2015 sebanyak 1.554.643. hal ini dapat menunjukkan bahwa Kota Bandung menjadi salah satu Kota yang berkembang dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Perusahaan, Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Di Kota Bandung Tahun 1999-2013”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat di uraikan menjadi identifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kota Bandung secara parsial maupun secara simultan ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Dari uraian pada identifikasi masalah maka tujuan penelitian ini menggambarkan tentang sesuatu yang hendak akan dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kota Bandung secara parsial maupun secara simultan

**1.4** **Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis/akademis, memberikan tambhan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi pembangunan sehingga dapat dijadikan masukan, referensi serta perkembangan penelitian sejenis dimasa akan datang.
2. Bagi peneliti memberikan tambahan dan wawasan mengenai pengaruh upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor indutri manufaktur di kota Bandung.
3. Secara praktis/empiris untuk mengetahui perkembangan penyerapan tenaga kerja di kota Bandung.
4. Membantu pihak-pihak perumus atupun bagi para pengambil keputusan di indutri yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.